

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2023



**DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA TANJUNGPINANG**

KATA PENGANTAR

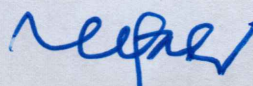
Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Akhir Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2023, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

.Rencana Kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang, APBD Provinsi dan APBN, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu

Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Juni 2022
Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
Kota Tanjungpinang,



YONI FADRI
Pembina Tingkat I
NIP. 19700503 200312 1 006

DAFTAR ISI

Halaman	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPPD	12
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	17
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2. Tujuan dan Sasaran OPD	17
3.2. Program dan Kegiatan.....	18
BAB IV. PENUTUP.....	26
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan OPD, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis OPD. RENJA OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Renja-OPD disusun bertahap mulai dari Rancangan Awal RENJA OPD yang mengacu pada rancangan awal RKPD, RENSTRA OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan masalah yang dihadapi. Perencanaan daerah berorientasi pada proses dengan pendekatan secara teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas. Sehingga perumusan program kegiatan harus memperhatikan pencapaian yang ditetapkan dalam RPJMD, hasil musrenbang, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat dan kebijakan-kebijakan strategis. Sehingga setelah adanya Rancangan Awal Renja OPD, akan dirumuskan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Tahun 2022 tentang RKPD Kota Tanjungpinang TA 2023. Peraturan tersebut menjadi pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1).
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perincian tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 43);.
16. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Akhir OPD mempunyai maksud sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun sebelumnya dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2023.
- Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Akhir OPD adalah untuk memasukkan Rencana Program / kegiatan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2023

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2023, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Sebelum menyusun Rencana Kerja Tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan juga tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2020. Evaluasi Rencana Kerja OPD memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja OPD Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dan Pencapaian Perencanaan Strategisnya, dapat dilihat pada tabel di bawah :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kajian Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

No.	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Realisasi Capaian	Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan (%)	59,7	60	62	64	66	68	81.43	66
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,6	92	92	94	94	95	90,7	94
3	Ketersediaan Pangan Utama (%)	80,13	95	96	97	98	99	6,25	98
4	Angka Kecukupan Energi ketersediaan (kg/kap/th)	1.713	2.300	2.310	2.320	2.330	2.340	2.193	2.330
5	Angka Kecukupan Protein Ketersediaan (Kg/Kap/th)	45,37	57	58	59	60	61	64.76	60
6	Angka Kecukupan Energi Konsumsi (Kg/Kap/th)	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.266	2.150
7	Angka Kecukupan Protein konsumsi (Kg/Kap/th)	73,2	74	74	74	74	74	77	74
8	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen (%)	2,69	<10	<10	<10	<10	<10	0	<10

No.	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Realisasi Capaian	Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat (%).	63,87	78,46	81,46	84,46	87,46	90,46	59,57	87,46
10	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman (%).	80	90	90	90	95	95	87,5	95
11	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.947	2.800	3.000	3.300	3.500	3.700	632,45	3.500
12	Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	43,3	43,3	43,5	43,7	43,9	44	63,64	43,9
13	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	5	10	10	10	10	11	15	10
14	Nilai Eksport Perikanan	18,75	18,88	19,01	19,14	19,28	19,41	12,37	19,28
15	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	80,22	95	115	130	140	150	123,48	140
16	Persentase pembudidayaan ikan menerapkan CBIB	57,00	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00	70	80,00
17	Jumlah produksi tanaman palawija	505	515	525	535	545	560	104	545
18	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	1.158	1.125	1.150	1.175	1.200	1.225	1.326	1.200
19	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	76	100	101	105	107	109	80	107

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Realisasi Capaian	Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Cakupan Bina Kelompok (%)	85	90	95	100	100	100	100	100
21	Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	2.722	2.858	3.000	3.150	3.307	3.472	3.305	3.307
22	Populasi Ternak	296.740	311.567	327.154	343.512	360.687	378.721	341.447	360.687
23	Tingkat Kematian Ternak	3,7	3,5	3	2,5	2	2	4,37	2
24	Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	16	2	2	2	2	2	58,12	2
25	Nilai Jual Hasil Produk Peternakan Kelompok Ternak Binaan.	16.911.500	17.216.700	17.522.000	17.926.300	18.129.500	18.329.600	19.500.000	18.129.500

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menjalankan urusan pemerintah pada Urusan Wajib yang tidak pelayanan dasar yaitu Urusan Pangan dan Urusan Pilihan pada Urusan Perikanan dan Pertanian. Dalam pelaksanaan urusan tersebut perlu adanya analisis lingkungan yang merupakan peluang dan tantangan di Lingkungan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran strategis untuk menwujudkan Visi dan Misi RPJMD Kota Tanjungpinang. Tantangan dan Peluang yang teridentifikasi sebagai berikut :

a. Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan

Pengembangan Pelayanan Dinas Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Urusan Pangan :

- a. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya menjadi tantangan dalam penyediaan pangan, yang sangat ditentukan oleh produksi pangan lokal dan pasokan pangan dari luar daerah.
- b. Rendahnya produksi pangan lokal dan tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah sangat berpengaruh pada stabilitas harga pangan sehingga distribusi dan pemantauan harga pangan menjadi hal yang prioritas.
- c. Pemahaman terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih rendah yang dipengaruhi adat dan tradisi serta kebiasaan makan.
- d. Penggunaan pestisida, bahan kimia dan bahan tambahan pangan yang cenderung meningkat pada pangan segar dan kurangnya pemahaman terhadap produk pangan hewani yang higienis memerlukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan yang beredar.

Urusan Pertanian

- a. Ketersediaan lahan cenderung terus menurun karena alih fungsi lahan untuk perluasan perumahan, perdagangan dan sektor-sektor lainnya dan ditambah ketidakjelasan status kepemilikan lahan yang tersedia.
- b. Ancaman perubahan iklim global yang berdampak pada perubahan pola cuaca dan intensitas curah hujan, yang menyebabkan bergesernya pola tanam dan rentannya muncul hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

- c. Lokasi pertanian terpencar dengan luasan lahan budidaya yang relatif kecil, sehingga menjadi kurang efisien yang mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi.
- d. Kelembagaan tani yang masih lemah dalam kemitraan usaha, pemodalan dan pemanfaatan peluang pasar.
- e. Pola pikir dan perilaku petani yang masih berorientasi pada aspek produksi tanpa memperhatikan mutu, sehingga harga yang diterima petani relatif rendah.
- f. Berkurangnya minat tenaga muda di sektor pertanian, yang cenderung lebih memilih bekerja pada sektor industri dan sektor lainnya.

Urusan Perikanan

- a. Lemahnya pemodalan dalam menunjang usaha perikanan terutama usaha kecil dan menengah.
- b. Kuota BBM bersubsidi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan masih terbatas.
- c. Pengelolaan pemasaran dan teknologi pengolahan perikanan yang belum memadai.
- d. Peningkatan alih fungsi lahan potensial budidaya perikanan ke kegiatan non sektor perikanan.
- e. Masih lemahnya kelembagaan kelompok nelayan dan rendahnya kualitas sumber daya pelaku usaha sektor perikanan.

b. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Urusan Pangan :

- a. Tersedianya lahan pekarangan dan belum dikelola secara optimal untuk penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal;
- b. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui dana APBN pada dana Tugas Pembantuan serta dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi.

Urusan Pertanian :

- a. Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha.
- b. Perkembangan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan yang semakin baik memberikan peluang dalam pengembangan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan.
- c. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian dan perikanan melalui APBN pada Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan serta dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi.
- d. Meningkatkan permintaan pasar terhadap produk-produk pertanian.

Urusan Perikanan

- a. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum termanfaatkan secara optimal.
- b. Letak yang strategis Kota Tanjungpinang sangat menguntungkan untuk pemasaran produksi perikanan.
- c. Tingginya permintaan ikan untuk memenuhi pasar lokal dan luar negeri, yang mana perikanan memiliki potensi sebagai salah satu sektor unggulan.
- d. Adanya kebijakan dan dukungan pemerintah untuk pengembangan usaha perikanan dengan memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil.

- e. Peluang investasi pada bidang pengolahan dan pemasaran produk perikanan dengan keunggulan jenis dan kualitas produk.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rancana Kerja yang berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2019-2023 untuk tercapainya sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Pengusulan kegiatan juga memperhatikan usulan dari masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Kota. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, terutama untuk mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan dan memperhatikan Kebijakan Nasional yang tertuang dalam bentuk Program Prioritas Nasional untuk mendukung tercapainya Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran OPD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan OPD merupakan wujud dari sasaran yang akan dicapai pada RPJMD. Sasaran dalam RPJMD adalah Meningkatnya Produksi Perikanan dan Terwujudnya Ketahanan Pangan. Sasaran ini dalam rangka mewujudkan tujuan RPJMD untuk tercapainya Visi Kota Tanjungpinang, yaitu : "Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani". Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan berperan pada unsur visi untuk mewujudkan "Kota yang Maju dan Sejahtera"

Dari Sasaran RPJMD tersebut, tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang

diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan.
2. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan.
3. Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan.
4. Meningkatnya produktivitas perikanan.
5. Meningkatnya daya saing produksi perikanan.

3.2. Program dan Kegiatan

Dengan adanya tujuan dan sasaran maka dijabarkan program dan kegiatan yang merupakan upaya yang akan ditempuh untuk mencapai Pembangunan sebagaimana RPJMD 2018-2023.

Dalam implementasinya agar program dan kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi maka masing – masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Matriks Rencana Kerja tersebut berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2018-2023, dengan memperhatikan program, kegiatan, indikator, target dan pagu indikatif pada Rencana Kerja Tahun 2023.

Matrik Rencana Kerja Tahun 2023 sebagaimana berikut :

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sosial Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 050 889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	11	12	9	10	11	12
DP3							Rp 20.914.952.869				Rp 23.006.448.166
x.xx		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					Rp 11.875.031.587				Rp 13.062.534.746
x.xx.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA.	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah.	%	Tanjungpinang		Rp 10.561.031.587				Rp 11.617.134.746
x.xx.01.2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.					Rp 6.619.390.627				Rp 7.281.329.690
x.xx.01.2.02.01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Tanjungpinang	12	Rp 6.619.390.627	APBD Kota		12	Rp 7.281.329.690
x.xx.01.2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Rp 20.000.000				Rp 22.000.000
x.xx.01.2.05.09		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bulan	Tanjungpinang	12	Rp 20.000.000	APBD Kota		12	Rp 22.000.000
x.xx.01.2.01	PROGRAM Peningkatan PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp 74.000.000				Rp 81.400.000
x.xx.01.2.01.01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tanjungpinang	5	Rp 39.000.000	APBD Kota		5	Rp 42.900.000
x.xx.01.2.01.07		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Tanjungpinang	5	Rp 35.000.000	APBD Kota		5	Rp 38.500.000
x.xx.01.2.06	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.					Rp 661.840.000				Rp 728.024.000
x.xx.01.2.06.01		Sub Kegiatan Penyediaan / Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	12	Rp 25.000.000	APBD Kota		12	Rp 27.500.000
x.xx.01.2.06.02		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	12	Rp 150.000.000	APBD Kota		12	Rp 165.000.000
x.xx.01.2.06.03		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	12	Rp 30.000.000	APBD Kota		12	Rp 33.000.000
x.xx.01.2.06.04		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	12	Rp 75.000.000	APBD Kota		12	Rp 82.500.000
x.xx.01.2.06.05		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	12	Rp 61.840.000	APBD Kota		12	Rp 68.024.000
x.xx.01.2.06.07		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material.	Jumlah Paket bahan/Material yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	12	Rp 40.000.000	APBD Kota		12	Rp 44.000.000
x.xx.01.2.06.09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Tanjungpinang	12	Rp 180.000.000	APBD Kota		12	Rp 198.000.000
x.xx.01.2.06.11		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Tanjungpinang	12	Rp 100.000.000	APBD Kota		12	Rp 110.000.000

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 050/889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	11	12	9	10	11	12
x.xx.01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah.					Rp 491.000.000				Rp 540.100.000
x.xx.01.2.07.01		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Tanjungpinang	3	Rp 100.000.000	APBD Kota		2	Rp 110.000.000
x.xx.01.2.07.05		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Tanjungpinang	12	Rp 40.000.000	APBD Kota		12	Rp 44.000.000
x.xx.01.2.07.06		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Tanjungpinang	2	Rp 351.000.000	APBD Kota		2	Rp 386.100.000
x.xx.01.2.08.	Kegiatan Operasional Rutin Kantor	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah.					Rp 1.720.175.960				Rp 1.892.193.556
x.xx.01.2.08.02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	Tanjungpinang	12	Rp 207.285.000	APBD Kota		12	Rp 228.013.500
x.xx.01.2.08.03		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	Tanjungpinang	12	Rp 40.000.000	APBD Kota		12	Rp 44.000.000
x.xx.01.2.08.04	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	Tanjungpinang	70	Rp 1.472.890.960	APBD Kota		70	Rp 1.620.180.056
x.xx.01.2.09.	Kegiatan Operasional Rutin Kantor	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah.					Rp 974.625.000				Rp 1.072.087.500
x.xx.01.2.09.01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Tanjungpinang	12	Rp 570.000.000	APBD Kota		12	Rp 627.000.000
x.xx.01.2.09.06		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Tanjungpinang	12	Rp 64.625.000	APBD Kota		12	Rp 71.087.500
x.xx.01.2.09.09		Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Tanjungpinang	12	Rp 190.000.000	APBD Kota		12	Rp 209.000.000
x.xx.01.2.09.10		Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	Tanjungpinang	12	Rp 50.000.000	APBD Kota		12	Rp 55.000.000
x.xx.01.2.09.08		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Bulan	Tanjungpinang	12	Rp 100.000.000	APBD Kota			Rp 110.000.000
2.09.		JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN.					Rp 1.314.000.000				Rp 1.445.400.000
2.09.03.		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT.	Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (Beras) di Tingkat Konsumen.	%	Tanjungpinang	<10	Rp 1.064.000.000			<10	Rp 1.170.400.000
2.09.03.2.01.		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					Rp 60.000.000				Rp 66.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGKAPAN RAWAN PANGAN.										
2.09.03.2.01.01	Kegiatan Analisis Neraca Bahan Makanan.	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan.	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	laporan	Tanjungpinang	1	Rp 35.000.000	APBD Kota		1	Rp 38.500.000

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 050 889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		4	5	6	11	12	9	10	11	12	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA PANGAN.											
2.09.03.2.01.04	Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok.	Sub Kegiatan Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan.	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Komoditas	Tanjungpinang	20	Rp 25.000.000	APBD Kota		20	Rp 27.500.000	
2.09.03.2.01.05	Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Pangan.	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	Tanjungpinang	-	0	APBD Kota		-	0	
2.09.03.2.02.		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota.					Rp 150.000.000				Rp 165.000.000	
2.09.03.2.02.03.	Kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Sub Kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota.	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	Tanjungpinang	10	Rp 150.000.000	APBD Kota		10	Rp 165.000.000	
2.09.03.2.04.		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan angka kecukupan gizi					Rp 854.000.000				Rp 939.400.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN.											
2.09.03.2.04.02.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	laporan	Tanjungpinang	4	Rp 354.000.000	APBD Kota		4	Rp 389.400.000	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	laporan	Tanjungpinang		Rp 500.000.000	DAK NON FISIK			Rp 550.000.000	
	Kegiatan Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA.											
2.09.04.		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN.	Angka Kecukupan Energi Ketersediaan.	kcal/kap /hr	Tanjungpinang	2.340	Rp 50.000.000	APBD		2.340	Rp 55.000.000	
		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.	Angka Kecukupan Protein Ketersediaan.	gr/kap/hr		61				61		
2.09.04.2.01.	PROGRAM PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN.						Rp 50.000.000	APBD Kota			Rp 55.000.000	
2.09.04.2.01.01	Kegiatan Laporan Kondisi Ketahanan Pangan.	Sub Kegiatan Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	Tanjungpinang	1	Rp 50.000.000	APBD Kota		1	Rp 55.000.000	
	Kegiatan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA).											
2.09.05.		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN.	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.	%	Tanjungpinang	95	Rp 200.000.000	APBD		95	Rp 220.000.000	
			Persentase Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman.	%		95				95		
2.09.05.2.01.		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota.					Rp 200.000.000				Rp 220.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN.											
2.09.05.2.01.04	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Tanjungpinang	10	Rp 200.000.000	APBD Kota		3	Rp 220.000.000	

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 050 889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023					Rencana Tahun 2024		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.25	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	5	6	11	12	9	10	11	12	
3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP.					Rp 3.843.063.000				Rp 4.227.369.300	
3.25.03.2.01		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.					Rp 1.492.988.000				Rp 1.642.286.800	
							Rp 1.243.000.000				Rp 1.367.300.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP.										
3.25.03.2.01.02		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	Tanjungpinang	8	Rp 704.000.000	DAK			Rp 774.400.000	
		Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	Tanjungpinang		Rp 539.000.000	DAK			Rp 592.900.000	
3.25.03.2.02		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pendamping DAK)										
3.25.03.2.02.01		Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	Tanjungpinang	30	Rp 249.988.000	APBD Kota		40	Rp 274.986.800	
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Rumah Tangga Nelayan.	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	unit usaha								
3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA.					Rp 2.085.000.000				Rp 2.293.500.000	
3.25.04.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil.					Rp 545.000.000				Rp 599.500.000	
3.25.04.2.02.4		Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	Tanjungpinang	20	Rp 100.000.000	APBD Kota		30	Rp 110.000.000	
		Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidayaan Ikan Kecil yang Mengikuti pengembangan kapasitas	Kelompok	Tanjungpinang		Rp 445.000.000				Rp 489.500.000	
3.25.04.2.04		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.					Rp 1.540.000.000				Rp 1.694.000.000	
3.25.04.2.04.02		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Tanjungpinang	13	Rp 570.000.000	APBD Kota		16	Rp 627.000.000	
3.25.04.2.04.03		Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Tanjungpinang	13	Rp 470.000.000	DAK		16	Rp 517.000.000	
		Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Tanjungpinang	20	Rp 500.000.000	APBD Kota		22	Rp 550.000.000	
3.25.04.2.04.02		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Laut.	Jumlah Prasarana	Unit	Tanjungpinang	13		APBD Kota Provinsi				

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 050 889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	11	12	9	10	11	12	
3.25.04.2.04.03			Jumlah Sarana	Paket	Tanjungpinang		APBD Kota Provinsi				
3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN.				Rp 265.075.000				Rp 291.582.500	
3.25.06.2.02.		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.				Rp 163.840.000				Rp 180.224.000	
	PROGRAM PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN.										
3.25.06.2.02.01	Kegiatan Peningkatan Inovasi dan Kreativitas Produk Perikanan.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerangan Terhadap Penerapan Persyaratan Perincian Benar-benar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah unit usaha	Tanjungpinang	20	Rp 163.840.000	APBD Kota		20	Rp 180.224.000	
	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Perikanan.										
	Kegiatan Akses Pasar dan Promosi Hasil Perikanan.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten Kota				Rp 101.235.000				Rp 111.358.500	
	Kegiatan Kualitas Mutu Perikanan.	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	pelaku usaha	Tanjungpinang	3	Rp 101.235.000				Rp 111.358.500	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN.				Rp 5.196.858.282				Rp 5.716.544.110	
3.27.02.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Pertanian	Ton	Tanjungpinang	Rp 1.699.535.800	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.869.489.380	
3.27.02.2.02.		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota.				Rp 889.535.800				Rp 978.489.380	
3.27.02.2.02.01	Kegiatan Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman Buah-buahan.	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman.	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	vub	Tanjungpinang	4	Rp 889.535.800	APBD Kota	4	Rp 978.489.380	
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN.									Rp -	
3.27.02.2.02.02	Kegiatan Penyediaan dan Penataan Sarana dan Prasarana Pusat Perbibitan Sapi.									Rp -	
3.27.02.2.06.		Kegiatan Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah di Kabupaten / Kota Lain.				Rp 730.000.000				Rp 803.000.000	
3.27.02.2.06.01	Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia.	Sub Kegiatan Pengadaan Benih / Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lainnya.	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	Tanjungpinang	Rp 600.000.000	APBD Kota		520	Rp 660.000.000	
	Kegiatan Pengembangan Budidaya Unggas.										
	Kegiatan Pengembangan Budidaya Aneka Ternak.										
3.27.02.2.06.02	Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia.	Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain.	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ton	Tanjungpinang	1	Rp 130.000.000	APBD Kota	1	Rp 143.000.000	

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 080 889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				5	6	11	12	9	10	11	12
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kab/Kota					Rp 80.000.000				Rp 88.000.000
		Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/pakan	laporan			Rp 80.000.000				Rp 88.000.000
3.27.03.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN.					Rp 1.304.985.600				Rp 1.435.484.160
3.27.03.2.02.		Kegiatan Pembungunan Prasarana Pertanian.									
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit			Rp 200.000.000				Rp 220.000.000
		Kegiatan : Pembangunan /Perbaikan Balai/Instansi Perbibitan dan HPT dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)									
		Kegiatan : Pembangunan/Perbaikan Balai/Instansi Perbibitan dan HPT dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)									
		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN PERKEBUNAN									
		Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung Kebun Koleksi Tanaman Buah-buahan Tropika	Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.	Paket	Tanjungpinang	1	Rp 1.029.985.600	APBD Kota		3	Rp 1.132.984.160
		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/									
		Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian									
		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN									
		Kegiatan Pembanguna Sarana dan Prasaran Pendukung Pusat Pembibitan									
		Kegiatan Pembangunan /Perbaikan Balai Instalasi Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan									
		Kegiatan Pembangunan /Perbaikan Balai Instalasi Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan									
3.27.03.2.02.04		Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum					Rp 75.000.000				Rp 82.500.000
3.27.03.2.02.04.02		Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Ha			Rp 75.000.000				Rp 82.500.000
3.27.04.		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER.	Tingkat Kematian Ternak.	%	Tanjungpinang		Rp 525.000.000				Rp 577.500.000
			Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Munular.	%							
3.27.04.2.01		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN.	Kegiatan PEnjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota				Rp 110.000.000				Rp 121.000.000

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 050/889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	11	12	9	10	11	12
3.27.04.2.01.01	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis.	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	laporan	Tanjungpinang	2	Rp 110.000.000	APBD Kota		2	Rp 121.000.000
			Jumlah yang diberikan KIE	Orang		50				50	
3.27.04.2.03.		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten / Kota.					Rp 265.000.000				Rp 291.500.000
3.27.04.2.03.02	Kegiatan Optimalisasi Puskesmas.	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	laporan	Tanjungpinang	164	Rp 115.000.000	APBD Kota		164	Rp 126.500.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				Rp 150.000.000	DAK NON FISIK			Rp 165.000.000
3.27.04.2.04.		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteter.					Rp 150.000.000				Rp 165.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN.										
3.27.04.2.04.02	Kegiatan Penjaminan Keamanan Pangan Hewan.	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.	Jumlah Pengawasan Penderan Hewan dan Produk Hewan	laporan	laporan	12	Rp 150.000.000	APBD Kota		12	Rp 165.000.000
3.27.07.		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN.	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	Tanjungpinang	100	Rp 1.667.336.882	APBD		100	Rp 1.834.070.570
3.27.07.2.01.		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.					Rp 1.667.336.882				Rp 1.834.070.570
	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI.										
3.27.07.2.01.02	Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan SDM Tani.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	Tanjungpinang	78	Rp 898.163.300	APBD Kota		78	Rp 987.979.630
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN.										
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peternakan.			unit							
3.27.07.2.01.03	Kegiatan Pembinaan Usaha Taniaman Hias.	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	Tanjungpinang		Rp 399.999.630	APBD Kota		50	Rp 439.999.593
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN PERKEBUNAN.										
3.27.07.2.01.05	Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan.	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota.	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	Tanjungpinang	6	Rp 369.173.952	APBD Kota		1	Rp 406.091.347

Tanjungpinang, Juni 2022
Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
Kota Tanjungpinang,



YONNI FADRI
Pembina Tingkat I
NIP. 19700503 200312 1 016

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang tahun 2023 ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

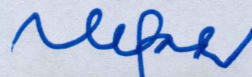
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang, APBD Provinsi dan APBN, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja ini dengan sebaik-baiknya. Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan RAPBD Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Juni 2022

Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

Kota Tanjungpinang,



YONI FADRI
Pembina Tk.I

NIP. 19700503 200312 1 006